



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA TOLERANSI DI KOTA SINGKAWANG

Gina Agrivina ^{*1}, Ani Martini ²

Asdaf Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Program Studi Politik Indonesia Terapan IPDN

E-mail: 32.0693@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Keragaman sosial yang meningkat di kota multikultural seperti Singkawang menuntut tata kelola yang efektif untuk mengelola pluralisme dan membangun toleransi. Namun, koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali terfragmentasi sehingga membatasi potensi terciptanya harmoni sosial yang inklusif. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan pelaksanaan collaborative governance sebagai strategi membangun kota toleran melalui kerjasama lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang, dengan fokus pada partisipasi pemangku kepentingan, kemitraan kelembagaan, pengambilan keputusan demokratis, desentralisasi, jaringan sosial, dan adaptabilitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik Collaborative governance dalam konteks nyata Kota Singkawang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang berjalan melalui enam dimensi utama, yakni partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kewenangan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Setiap dimensi memperlihatkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, komunitas adat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam membangun harmoni sosial. Dengan mempertimbangkan keenam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Collaborative governance di Singkawang sudah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat toleransi sosial.

Keyword

*Collaborative Governance,
Partisipasi,
Kemitraan,
Keputusan demokratis,
Desentralisasi,
Adaptabilitas kebijakan*

1. PENDAHULUAN

Isu toleransi di Indonesia terus menjadi perhatian penting dalam pembangunan sosial, khususnya di wilayah multikultural seperti Kota Singkawang. Kota ini dikenal memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi, sehingga pengelolaan kehidupan sosialnya menuntut pendekatan kolaboratif dan inklusif dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan integrasi sosial dan mendorong terciptanya kota toleran yang stabil secara sosial dan politik (Ansell & Gash, 2008). Konsep Collaborative governance menekankan perlunya keterlibatan aktif berbagai aktor baik dari sektor pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik secara bersama-sama.

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative governance dalam mewujudkan kota toleransi di Kota Singkawang. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji peran pemerintah daerah, dinamika antaraktor kolaboratif, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam menjaga harmoni sosial di wilayah yang plural.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik Collaborative governance dalam konteks nyata Kota Singkawang. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali makna, perspektif, dan pengalaman para aktor secara lebih kaya dan kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan belas hari, di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan di lokasi tersebut dipilih karena Singkawang merupakan kota multikultural yang menjadi fokus studi mengenai tata kelola sosial dan pembangunan toleransi. Waktu penelitian disesuaikan agar mencakup periode aktivitas kolaborasi yang signifikan, termasuk pelaksanaan program-program kebudayaan dan dialog antar komunitas yang rutin berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami secara mendalam praktik Collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang, penelitian ini menggunakan kerangka teori Collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansel dan Gash (2016). Teori ini menguraikan enam karakteristik utama, partisipasi aktif, kemitraan antara pemerintah dan sektor lain, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kekuasaan, penciptaan jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas yang menjadi pijakan dalam menganalisis dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan. Keenam karakteristik tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana proses kolaborasi terbentuk, dijalankan, dan menghadapi tantangan dalam konteks pembangunan sosial dan budaya yang inklusif di Kota Singkawang.

3.1. Partisipasi Aktif

Menurut Ansel dan Gash (2016), partisipasi aktif merupakan karakteristik utama dalam Collaborative governance yang menandai keterlibatan nyata dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks Kota Singkawang, keterlibatan ini tercermin dari kehadiran dan kontribusi pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam pertemuan dan forum koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah daerah maupun komunitas. **Indikator pertama**, yaitu keterlibatan dalam pertemuan pemangku kepentingan, memperlihatkan bahwa keberlangsungan kolaborasi sangat bergantung pada partisipasi langsung para aktor yang berkepentingan. Pemerintah daerah menginisiasi dialog lintas sektoral yang melibatkan tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan,

serta sektor swasta. Keterlibatan ini memungkinkan penyamaan persepsi dan pemecahan masalah secara bersama. **Indikator kedua**, keberagaman pemangku kepentingan menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, yakni melibatkan berbagai kelompok sosial dan budaya secara representatif. Keberagaman ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mewakili kepentingan seluruh masyarakat, mendorong inklusivitas, dan memperkuat legitimasi proses kolaborasi.

Secara keseluruhan, dimensi partisipasi aktif sesuai dengan karakteristik yang diuraikan Ansel dan Gash (2016) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh keterlibatan yang luas, inklusif, dan bermakna dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program di Kota Singkawang.

3.2. Kemitraan Pemerintah dan Sektor Lain

Kemitraan antara pemerintah dan sektor lain merupakan karakteristik esensial dalam Collaborative governance menurut Ansel dan Gash (2016), yang menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Di Kota Singkawang, kemitraan ini terwujud melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas budaya dalam pelaksanaan program-program sosial dan kebudayaan. Indikator keberagaman stakeholder dalam kemitraan menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kapasitas berbeda. Selanjutnya, indikator tanggung jawab bersama menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program bukan hanya beban pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif. Di Singkawang, hal ini tercermin dalam pengelolaan acara budaya dan dialog antar komunitas yang dijalankan bersama oleh berbagai pihak secara sinergis, sehingga memperkuat ikatan sosial dan mendorong keberlanjutan inisiatif toleransi.

Namun, tantangan yang muncul antara lain ketidakseimbangan kontribusi dan persepsi tanggung jawab, dimana beberapa aktor merasa peran mereka kurang dihargai atau terbatas dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih baik agar kemitraan berjalan efektif dan inklusif.

3.3. Keputusan Demokratis dan Transparan

Karakteristik keputusan demokratis dan transparan menurut Ansel dan Gash (2016) menunjukkan bahwa dalam tata kelola kolaboratif, proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas. Indikator kemudahan akses dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa di Singkawang, berbagai forum dan mekanisme konsultasi publik diadakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan kelompok kepentingan menyampaikan aspirasi dan kritik secara langsung. Sementara itu, indikator tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan persepsi positif publik terhadap proses pengambilan keputusan. Meskipun banyak pihak merasa proses sudah cukup terbuka, beberapa kelompok minoritas masih mengeluhkan keterbatasan akses informasi dan kurangnya representasi yang memadai.

Oleh karena itu, peningkatan mekanisme komunikasi publik dan penyebaran informasi yang merata menjadi hal penting untuk memperkuat transparansi dan demokrasi dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola kota toleran.

3.4. Desentralisasi

Desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab menjadi dimensi penting dalam Collaborative governance yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan

sumber daya untuk mengelola masalah lokal secara efektif (Ansel dan Gash, 2016). Indikator distribusi kewenangan mengacu pada pelimpahan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Singkawang, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keberagaman sosial dapat disesuaikan dengan konteks lokal yang unik. Selain itu, indikator kolaborasi pusat-daerah menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mekanisme koordinasi lintas tingkat pemerintahan perlu terus ditingkatkan agar desentralisasi dapat memberikan manfaat maksimal dalam menjaga keharmonisan sosial di kota multikultural ini.

3.5. Jaringan Sosial dan Kepercayaan

Menurut Ansel dan Gash (2016), penciptaan jaringan sosial yang kokoh dan kepercayaan antaraktor menjadi fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Indikator keterbukaan informasi menunjukkan bahwa di Singkawang, transparansi dan komunikasi terbuka antar kelompok sosial, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka yang berpotensi memicu konflik. Indikator komitmen menjaga hubungan kolaboratif menegaskan bahwa kepercayaan dibangun bukan hanya dari keterbukaan, tetapi juga dari konsistensi dan keberlanjutan interaksi antar aktor.

Meski demikian, tantangan muncul dari adanya ketidakpercayaan historis dan perbedaan budaya yang memerlukan waktu dan upaya terus menerus untuk diatasi agar jaringan sosial dan kepercayaan ini dapat tumbuh dan memberi dampak positif.

3.6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Fleksibilitas dan adaptabilitas merupakan karakteristik krusial dalam Collaborative governance yang memungkinkan pengelolaan kebijakan dan strategi yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat (Ansel dan Gash, 2016). Indikator kemampuan mengubah kebijakan atau strategi menunjukkan bahwa pemerintah dan aktor lain di Singkawang harus siap menyesuaikan program dan pendekatan mereka berdasarkan evaluasi dan dinamika lapangan, termasuk merespons isu-isu baru yang muncul dalam konteks keberagaman dan toleransi. Indikator kemampuan menyelesaikan konflik secara fleksibel menegaskan pentingnya mekanisme mediasi dan dialog yang adaptif dalam menangani perselisihan sosial tanpa harus mengedepankan konfrontasi, sehingga dapat menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

Praktik fleksibilitas ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan konflik yang kompleks dan berlapis, agar kolaborasi tetap berjalan efektif dan tujuan pembangunan kota toleran dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa praktik Collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang berlangsung melalui enam dimensi utama: partisipasi aktif, kemitraan pemerintah dan sektor lain, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kekuasaan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Masing-masing dimensi tersebut menunjukkan kekuatan sekaligus tantangan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas aktor dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberagaman budaya. Pada dimensi partisipasi aktif, keterlibatan beragam pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, komunitas adat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil telah memberikan kontribusi nyata dalam forum-forum dialog dan

pengambilan keputusan. Kemitraan antara pemerintah dan sektor lain menunjukkan sinergi yang baik dalam pelaksanaan program-program sosial budaya.

Keputusan yang demokratis dan transparan telah tercermin melalui akses terbuka bagi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap keterlibatan publik. Dimensi desentralisasi mengungkapkan bahwa distribusi kewenangan kepada pemerintah daerah memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal Singkawang. Jaringan sosial dan kepercayaan antar aktor menjadi modal sosial yang kuat dalam tata kelola kolaboratif. Keterbukaan informasi dan komitmen menjaga hubungan kolaboratif membantu membangun suasana saling percaya dan dukungan bersama. Terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas terlihat sebagai kunci dalam menghadapi dinamika sosial yang cepat berubah.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun Collaborative governance di Singkawang telah memberikan hasil positif dalam mewujudkan kota toleran, terdapat sejumlah kendala struktural dan proses yang harus diatasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang berjalan melalui enam dimensi utama, yakni partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, keputusan demokratis dan transparan, desentralisasi kewenangan, jaringan sosial dan kepercayaan, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Setiap dimensi memperlihatkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, komunitas adat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam membangun harmoni sosial. Dengan mempertimbangkan keenam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Collaborative governance di Singkawang sudah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat toleransi sosial.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup yang terbatas pada Kota Singkawang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke kota multikultural lain dengan konteks sosial dan politik yang berbeda. Selain itu, jumlah informan yang relatif terbatas dan keterbatasan waktu pengumpulan data menjadi faktor yang membatasi kedalaman dan keluasan data.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dengan melakukan studi komparatif di beberapa kota multikultural lain di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai praktik Collaborative governance dalam pembangunan kota toleran.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para informan dari Pemerintah Kota Singkawang, tokoh masyarakat, organisasi adat dan keagamaan, serta masyarakat sipil yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan profesionalisme memberikan arahan dan masukan berharga.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Br Sitepu, P. A., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438>
- Cepiku, D., & Meneguzzo, M. (2011). Public administration reform in Italy: A shopping-basket approach to the new public management or the New Weberianism? *International Journal of Public Administration*, 34(1–2), 19–25. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.506088>
- Chumairah, S. M., & Al-Hamdi, R. (2019). Dinamika Toleransi Di Kota Besar Indonesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan City of Tolerance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 175–183. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i2.540>
- Elston, T., Bel, G., & Wang, H. (2024). The effect of inter-municipal cooperation on social assistance programs: Evidence from housing allowances in England. *Journal of Policy Analysis and Management*, 1–29. <https://doi.org/10.1002/pam.22664>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 1–15. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587>
- Lewis, J. (2018). Prevent as an Intractable Policy Controversy: Implications and Solutions. *Journal for Deradicalization*, Summer(15), 111–150.
- Maine, J. (2025). Municipal corporations in national and disciplinary contexts: A systematic literature review and future research agenda. *International Public Management Journal*, 28(2), 217–237. <https://doi.org/10.1080/10967494.2024.2438764>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Onyango, G. (2024). Social Processes of Public Sector Collaborations in Kenya: Unpacking Challenges of Realising Joint Actions in Public Administration. In *Journal of the Knowledge Economy* (Issue 0123456789). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02176-5>
- Primastuti, A., Ika, S., Labolo, M., & Akbar, B. (2023). Analysis of Collaborative Actors in Regional Inflation Control Using Social Network Analysis. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.33701/jtp.v15i1.2896>
- Sitompul, G. F., & Athahirah, A. U. (2016). Collaborative Governance In Education Corporate Social Responsibility (Csr) Programs In Pahae Julu, North Tapanuli Regency, North Sumatera Province. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.1991> COLLABORATIVE

Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2019). Sinergi TNI Ad Dengan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Di Kota Tarakan). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 113. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284>

Velby, A. C., & Yuadi, I. (2023). Meta-Analitik Collaborative Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8, 19–41. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3455>